

STUDI LITERATUR ANALISIS PURCHASING POWER PARITY ASEAN+3

Raja Muda Cik M^{1*}, Fakhruddin²

- 1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email: rajamudacm@mhs.unsyiah.ac.id.
- 2) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email: fakhruddin.rudi@gmail.com.

Abstract

The purpose of this research is to study the condition of purchasing power parity of exchange rate in ASEAN+3 to US Dollar. The tested Variables in this study are inflation and exchange. Data is analysed by using two way tests to analyze purchasing power parity. The results of this study demonstrate that purchasing power parity hold in ASEAN+3. In general, integration of ASEAN+3 can be continued to the next stage, but each country in the ASEAN+3 region needs to pay attention to the exchange rate and inflation rate so that the purchasing power parity does not impact to each countries unexpectedly.

Keywords: *purchasing power parity, exchange rate, inflation, panel data*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi *purchasing power parity* nilai tukar mata uang pada negara ASEAN+3 terhadap US Dollar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi dan nilai tukar dengan pengujian dua arah untuk menganalisis *purchasing power parity*. Hasil analisis menjelaskan *purchasing power parity* dapat terjadi pada negara ASEAN+3. Secara umum integrasi ASEAN+3 dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, akan tetapi masing-masing negara dalam kawasan ASEAN+3 perlu memperhatikan tingkat nilai tukar dan inflasi agar proses *purchasing power parity* tidak merugikan bagi masing-masing negara.

Kata Kunci: *purchasing power parity, nilai tukar, inflasi, data panel*

PENDAHULUAN

Pergerakan globalisasi yang semakin meluas terhadap perdagangan internasional dapat dilihat dengan semakin bebasnya pasar dunia dan semakin berkurangnya hambatan dalam perdagangan global. Pengaruh globalisasi meningkatkan mobilitas dalam melakukan perdagangan internasional. Ekonomi saat ini menuntut perdagangan yang lebih terbuka.

Krisis ekonomi yang dialami ASEAN (*Asociation of South East Asia Nations*) tahun 1997 akibat dari *contagion effect* krisis keuangan di Thailand telah menyebabkan volatilitas kurs yang tajam, peningkatan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi (Fauziah, 2014). Krisis Finansial Asia tahun 1997 silam telah membuat para ahli ekonomi negara-negara ASEAN+3 berpikir untuk membentuk suatu integrasi ekonomi di kawasan ini.

ASEAN+3 merupakan forum yang berfungsi sebagai koordinator kerja sama antara asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan tiga negara Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini merupakan bentuk perluasan kerjasama ASEAN. ASEAN+3 mulai digagas pada KTT Informal ASEAN pada Desember 1997 di Malaysia untuk menjalin kerja sama lebih erat antara kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN dengan kawasan Asia Timur yang diwakili China, Jepang, dan Korea Selatan. Ide ini kemudian terinstitusionalisasi secara resmi pada tahun 1999 dengan nama *ASEAN Plus Three*. Pembentukan kerjasama ASEAN+3 merupakan suatu integrasi guna menjaga kestabilan kurs jika terjadi guncangan pada negara luar. ASEAN merupakan salah satu kawasan yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia. Saat ini ASEAN+3 termasuk dalam negara kekuatan ekonomi baru.

Pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk perkembangan harga (inflasi), kinerja ekspor impor yang pada gilirannya berpengaruh pada output perekonomian, Simanjuntak (2015).

Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat harga atau inflasi dengan pergerakan nilai tukar adalah teori paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity Theory* (PPP). Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dari luar negeri lebih menguntungkan untuk mengimpor barang dari luar negeri yang lebih murah. Tingkat inflasi yang tinggi juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi akibat diperlukannya lebih banyak uang untuk kepentingan transaksi. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar uang dan memicu depresiasi nilai tukar. Dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat inflasi antar negara dapat memengaruhi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Purchasing Power Parity

Teori *Purchasing Power Parity* menyatakan bahwa nilai tukar mata uang di antara dua negara sama dengan rasio dari tingkat harga di negara tersebut. *Purchasing Power Parity* digunakan sebagai alternatif nilai tukar mata uang di antara dua negara (Rahayu dan Lukman, 2007).

Pemikiran mengenai *Purchasing Power Parity* ditulis oleh ekonom dari Inggris pada abad 19, di antara mereka adalah David Ricardo. Ekonom Swedia, Gustav Cassel menulis di awal abad 20, mempopulerkan *Purchasing Power Parity* dengan membuat nya menjadi bagian utama dari teori nilai tukar.

Daya tarik dari teori paritas daya beli terletak pada pernyataan bahwa kurs antara dua mata uang dari dua negara, sama dengan nisbah atau rasio tingkat harga kedua negara bersangkutan. Kita tahu bahwa daya beli domestik dari mata uang suatu negara tercermin sepenuhnya pada

tingkat harga yang berlaku di negara itu sendiri. Teori Paritas Daya Beli (PPP) terdiri dari dua versi pokok yaitu teori paritas daya beli absolut dan teori paritas daya beli relatif (Salvatore, 2011).

Paritas Daya Beli Absolut

Salvatore, 2011 mengungkapkan bahwa teori paritas daya beli absolut merupakan titik ekuilibrium dari nilai tukar antar dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Secara spesifik, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$R = \frac{p}{p^*} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

R = Nilai tukar

p = tingkat harga domestik

p^* = tingkat harga asing

Paritas daya beli absolut memiliki asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional, harga dari sejumlah produk yang sama pada dua negara yang berbeda seharusnya setara jika diukur dalam mata uang yang sama. Biaya transportasi, bea masuk dan kuota perdagangan menyebabkan bentuk absolut dari paritas daya beli ini tidak akan terjadi. Paritas daya beli bentuk absolut ini menunjukkan nilai tukar yang dihitung dari perbandingan tingkat harga domestik dengan tingkat harga di luar negeri. Hubungan ekuilibrium yang diterapkan dalam paritas daya beli versi absolut mengasumsikan arbitrase komoditas sempurna antara dua negara.

Paritas Daya Beli Relatif

Teori paritas daya beli versi relatif (*relative purchasing power parity theory*) menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat-tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama (Salvatore, 2011). Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya bea masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama.

Pada paritas daya beli versi relatif, apabila terjadi perubahan harga di kedua negara, maka nilai tukar antar kedua negara tersebut juga harus mengalami perubahan juga.

Berikut ini adalah rumus paritas daya beli relatif:

$$R_1 = \frac{P_1/P_0}{P^*_1/P^*_0} \cdot R_0 \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

R = Nilai tukar

P = tingkat inflasi domestik

P^* = tingkat inflasi asing

Dari persamaan 2 , jika tingkat inflasi domestik (P) lebih besar daripada tingkat inflasi luar negeri (P^*) maka kurs valuta asing meningkat (mata uang domestik mengalami depresiasi). Bila tingkat inflasi domestik (P) lebih kecil dari tingkat inflasi luar negeri (P^*) kurs valuta asing menurun (mata uang domestik mengalami apresiasi).

Nilai Tukar

Menurut (Salvatore, 2011) “Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain atau mata uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain”. Mata uang suatu negara dapat diperjualbelikan dengan mata uang negara lain sesuai dengan kurs yang berlaku di pasar valuta asing.

Kurs mata uang suatu negara nilainya dapat berubah sewaktu-waktu, hal ini dipengaruhi akibat perubahan kondisi perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing disebut apresiasi. Sebaliknya, penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing disebut depresiasi.

Nilai Tukar Mata Uang Nominal

Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antar dua negara. Istilah nilai tukar mata uang antara dua negara yang di berlakukan di pasar valuta asing adalah nilai tukar mata uang nominal.

Nilai Tukar Mata Uang Riil

Nilai tukar mata uang riil adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang riil menyatakan tingkat harga dimana kita bisa memperdagangkan barang dari satu negara dengan barang negara lain.

Nilai tukar mata uang riil ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan tingkat harga domestik dan luar negeri (Mankiw, 2007).

$$Q = \frac{S \cdot P}{P^*} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana **Q** adalah nilai tukar riil, **S** adalah nilai tukar nominal, **P** harga barang dalam negeri dan **P*** adalah harga barang luar negeri. Dengan demikian, nilai tukar riil bergantung pada tingkat harga barang dalam negeri dan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

Sistem Nilai Tukar Mata Uang Tetap

Pada awal sistem moneter internasional modern abad ke-19, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap yang mengacu kepada standar emas (*Gold Standard*). Sistem ini juga mengalami pasang surut sehingga muncul sistem nilai tukar dengan mengacu pada kesepakatan Bretton Woods (Simorangkir dan Suseno, 2004).

Dalam sistem nilai tukar mata uang tetap, nilai tukar mata uang akan diatur oleh otoritas moneter tertingi (bank sentral) untuk selalu konstan. Otoritas moneter menjaga nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing tetap stabil dengan cara membeli atau menjual mata uang yang berada dalam devisa negara.

Efek penerapan nilai tukar tetap adalah peningkatan permintaan valuta asing yang berasal dari peningkat capital outflow dan impor tidak mengakibatkan nilai tukar mengalami depresiasi karena nilai tukar dipatok tetap terhadap mata uang asing lainnya. Jika bank sentral tidak melakukan intervensi, kondisi tersebut mengakibatkan nilai tukar *over-valued* sehingga ekspor menurun karena harga barang-barang ekspor lebih mahal. Penurunan neraca perdagangan ini akan menghilangkan dampak peningkatan pendapatan pada tahap pertama dan secara keseluruhan pendapatan agregat tidak akan meningkat.

Sistem Nilai Tukar Mata Uang Mengambang Bebas

Dalam rangka mencegah terkuras habisnya cadangan devisa, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan untuk mengambangkan rupiah dengan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (Simorangkir dan Suseno, 2004).

Sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas penetapan kurs ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Pada sistem ini nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, otoritas moneter tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing.

Salah satu keuntungan dari sistem nilai tukar mengambang bebas adalah cadangan devisa lebih aman karena rentang intervensi pemerintah dihapuskan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan spekulatif terhadap nilai tukar dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Keuntungan lain adalah bahwa bank sentral tidak perlu harus selalu mempertahankan nilai tukar pada suatu kisaran tertentu. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya intervensi yang mungkin dapat mengakibatkan dampak negatif pada ekonomi. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah akan berdampak buruk pada negara dengan tingkat perekeonomian yang belum mapan.

Sistem Nilai Tukar Mata Uang Mengambang Terkendali

Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar mata uang tetap dan nilai tukar mata uang mengambang bebas. Sistem nilai tukar mengambang terkendali berbeda dengan sistem mengambang bebas karena sistem ini tidak melarang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Tujuan intervensi tersebut adalah untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas pada tingkat yang moderat, serta mencegah pergerakan nilai yang terlalu besar.

Ketertarikan pembuat kebijakan untuk menggunakan sistem ini adalah terdapatnya kebebasan untuk menggunakan intervensi atau kebijakan lain, seperti suku bunga, untuk mencapai nilai tukar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi tanpa harus kehilangan kredibilitas. Akan tetapi, sistem ini dapat mendorong kegiatan spekulasi dan jika bank sentral atau pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup dapat mengakibatkan ambuknya sistem nilai tukar ini.

Inflasi

Mankiw (2007) menyebutkan bahwa inflasi adalah seluruh kenaikan dalam harga. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa masyarakat yang bersifat umum dan terus menerus. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, pada kenyataannya inflasi tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran dalam lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijakan pemerintah.

Secara garis besar, teori mengenai inflasi dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu mereka yang menganut paham monetaris dan paham non monetaris (Utari dan Pambudi, 2015).

Teori Monetarist

Teori klasik menganut paham monetaris. Teori ini menyatakan bahwa penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat harga bergerak ke atas, demikian pula sebaliknya.

Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum

ditentukan dari interaksi antara penawaran dan permintaan dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada tingkat harga keseimbangan, maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral.

Teori Non Monetarist

Pandangan yang berbeda dari konsep monetaris dapat digolongkan di antaranya adalah *Structuralist Theory* dan *Post Keynesian Theory*. Berbeda dengan teori klasik mengenai inflasi, teori strukturalis meyakini bahwa inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian.

Teori struktural mencoba menganalisis bagaimana fenomena inflasi terjadi, mencari akar permasalahannya serta menganalisis hubungan di antaranya. Kebanyakan analisis teori strukturalis mencerminkan kasus inflasi di negara berkembang. Penganut teori strukturalis dalam menyelesaikan permasalahan inflasi seringkali menggunakan pendekatan moneter dan fiskal.

Penelitian Sebelumnya

(Simanjuntak & pernika, 2015) menganalisis penerapan teori paritas daya beli kurs Rupiah terhadap Dollar AS dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan pengaruh tingkat inflasi, produk domestik bruto, jumlah uang beredar, dan cadangan devisa terhadap kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika dengan menggunakan alat analisis *Error Correction Model Engle-Granger*. Variabel (Simanjuntak & pernika)el dependen dalam penelitian ini adalah kurs, sedangkan variabel independennya adalah inflasi, produk domestik bruto, jumlah uang beredar, dan cadangan devisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek, teori paritas daya beli berlaku pada kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kurs Rupiah dalam jangka pendek maupun jangka panjang kecuali variabel jumlah uang beredar tidak berpengaruh dalam jangka panjang dan cadangan devisa tidak berpengaruh terhadap kurs dalam jangka pendek.

(Kartikaningtyas, Suhadak, & Rustam, 2014) menguji keberlakuan teori paritas daya beli empat mata uang utama dalam perdagangan dunia terhadap Rupiah Indonesia, yaitu Dollar AS-Rupiah, Yen-Rupiah, Poundsterling-Rupiah, dan Euro-Rupiah. Teori paritas daya beli menyatakan bahwa perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh perubahan rasio inflasi dari dua negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh berdasarkan data time series. Berdasarkan hasil regresi dan uji parsial (uji t), hasil penelitian menunjukkan pada pasangan Dollar AS-Rupiah dan Poundsterling-Rupiah didapatkan hasil yang sesuai dengan teori paritas daya beli, sementara pada pasangan Yen-Rupiah dan Euro-Rupiah didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan teori paritas daya beli.

(Engwerda, Boldea, Michalak, Plasmans, & Salmah, 2012) menganalisis pendapat yang pro dan kontra mengenai kondisi ekonomi moneter di kawasan ASEAN dengan dibentuknya *uni moneter* di Kawasan ASEAN. Metode estimasi regresi yang digunakan untuk melihat keterbukaan antara negara-negara di kawasan ASEAN digunakan DSGE model combined with *game theoretic behavior*. Hasil penelitian menunjukkan ada keuntungan besar dari kerjasama otoritas moneter. Selain itu ditemukan bahwa apakah serikat moneter meningkatkan atas kerjasama moneter tergantung pada jenis guncangan dan sejauh mana kerjasama kebijakan fiskal. Hasil didasarkan baik pada studi teoritis dari struktur model estimasi dan studi simulasi.

(Chang, Lee, & Liu, 2012) menguji validitas Paritas Daya Beli dalam jangka panjang. Metode estimasi yang digunakan adalah *Autoregressive* (ESTAR) unit root test. Hasil penelitian menunjukkan paritas daya beli bisa dipegang untuk 3 negara ASEAN yaitu (Indonesia, Thailand dan Malaysia) dan penyesuaian terhadap paritas daya beli adalah nonlinear dan asymmetric.

(Wu, Cheng, & Hou, 2011) menganalisis hubungan karakteristik antar negara terhadap Paritas daya beli. Metode estimasi yang digunakan untuk melihat karakteristik negara dan validitas paritas daya beli digunakan metode *panel unit root test*. Hasil penelitian menunjukkan paritas daya beli berlaku untuk panel pada Afrika dan Amerika latin tapi gagal pada asia dan eropa. kedua, validitas ppp berhubungan dengan beberapa karakteristik negara seperti keterbukaan yang tinggi, tingkat inflasi tinggi, tingkat pertumbuhan rendah, dan volatilitas nilai tukar nominal tinggi. ketiga, setelah mengendalikan hubungan antara karakteristik, penelitian saat ini menemukan bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan untuk validitas ppp hanya didasarkan pada karakteristik masing-masing negara. keempat, ppp berlaku jika negara-negara di kawasan ini memenuhi setidaknya dua karakteristik mendukung.

(Achsani, Fauzi, & Abdullah, 2009) menganalisis komparatif keterkaitan inflasi dengan nilai tukar riil di kawasan Asia (ASEAN+3) dan non Asia (Uni Eropa, Amerika Utara). Hasil penelitian terdapat korelasi yang kuat antara pergerakan inflasi dengan nilai tukar riil di sebagian besar negara-negara, selain itu untuk kasus seluruh kawasan dan kawasan Asia yang berlaku adalah hubungan kausalitas satu arah dimana baik tingkat depresiasi nilai tukar nominal maupun tingkat nilai tukar riil secara signifikan memiliki pengaruh terhadap laju inflasi. Sedangkan di kawasan non Asia hubungan kausalitas satu arah justru terjadi dimana laju inflasi yang memiliki pengaruh secara signifikan baik terhadap tingkat depresiasi nilai tukar nominal maupun tingkat nilai tukar riil.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan atau *explanatory research*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *purchasing power parity* pada kawasan ASEAN+3. Penelitian ini difokuskan pada analisis *purchasing power parity* ASEAN+3 yang mengambil sampel lokasi pada delapan negara yang terdiri dari lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand) dan tiga negara Asia Timur (Cina, Jepang dan Korea Selatan). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis mengenai *purchasing power parity* pada negara ASEAN+3 hasil studi literatur menunjukkan teori *purchasing power parity* dapat diterapkan pada negara ASEAN+3. Secara umum terdapat korelasi yang kuat antara pergerakan nilai tukar dengan inflasi dan inflasi dengan nilai tukar, ketika terdepresiasi nilai tukar akan mendorong peningkatan laju inflasi dan meningkatnya laju inflasi menyebabkan nilai tukar terdepresiasi.

Hasil studi literatur dari penelitian ini mendukung terpenuhinya *purchasing power parity* di negara ASEAN+3 maka tahapan integrasi yang lebih luas dapat dilanjutkan pada kawasan ASEAN+3

Saran

Berdasarkan hasil literatur review terdapat hubungan erat antara nilai tukar terhadap inflasi dan inflasi terhadap nilai tukar yang akan mendorong *purchasing power parity*. Pentingnya pengelolaan inflasi sebagai ukuran stabilitas perekonomian pada negara-negara ASEAN+3 mengharuskan adanya koordinasi Bank Sentral dan pemerintah dalam langkah pengendalian inflasi.

Masing-masing negara harus lebih memperhatikan tingkat nilai tukar dan inflasi terhadap US Dollar, karena dengan melemahnya nilai tukar secara terus-menerus akan menghambat proses *purchasing power parity* ASEAN+3, maka Bank Sentral beserta Otoritas moneter diharapkan mampu mengambil langkah untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada masing-masing negara.

Negara pada kawasan ASEAN harus mempersiapkan segala sumber daya yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan Negara-negara Asia Timur yang secara umum perkeekonomiannya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, N. A., Fauzi, A. J., & Abdullah, a. P. (2009). Keterkaitan Inflasi dengan Nilai Tukar Riil: Analisis Komparatif antara ASEAN+3, Uni Eropa dan Amerika Utara. *Majalah Ekonomi*, 231-250.
- Chang, T., Lee, C.-h., & Liu, W. C. (2012). Nonlinear adjustment to Purchasing Power Parity for ASEAN Countries. *Japan and the World Economy*, 325-331.
- Engwerda, Boldea, O., Michalak, T., Plasmans, J., & Salmah. (2012). A Smulation Study of an ASEAN Monetary Union. *Economic Modeling*, 1870-1890.
- Fauziah, F. Z. (2014). Analisis Fundamental Integrasi Ekonomi ASEAN. *Skripsi*.
- Kartikaningtyas, N., Suhadak, & R, R. H. (2014). Pengujian Teori Paritas Daya Beli Nilai Tukar Mata Uang Empat Mata Uang Utama terhadap Rupiah Indonesia (studi pada Bank Indonesia periode 2003.I-2013.II). *Administrasi Bisnis*, 1-9.
- Salvatore, D. (2011). *International Economics Trade and Finance*. Wiley.
- Simanjuntak, & pernika, E. P. (2015). Analisis Paritas Daya Beli Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat pada Sistem Kurs Mengambang Bebas di Indonesia Periode 1997.1 sampai 2013.4. *Economics Development Analysis Journa*, 265-275.
- Wu, J.-L., Cheng, S.-Y., & Hou, H. (2011). Further Evidence on Purchasing Power Parity and Country Characteristics. *International Review Economics and Finance*, 257-266.